



Dominasi Platform Digital Transnasional dan Neokolonialisme Digital di Indonesia: Perspektif Teori Ketergantungan

Chesy Ayuni Putri¹, Indah Fajarwati², Susi Fitria Dewi³, Maria Montessori⁴

FKIP, Universitas Negeri Padang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: chesyayuniputri@gmail.com, indahfajarwati55@guru.sma.belajar.id,

³susifitria@gmail.com, mariamontessori@unp.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

The development of the digital economy in Indonesia has experienced significant growth along with the increasing penetration of the internet, the use of digital platforms, and technology-based economic activities. However, this development has also given rise to issues related to the dominance of transnational digital platforms in controlling technology, data, and strategic digital infrastructure. This study aims to analyze the dominance of transnational digital platforms in Indonesia through the perspective of Dependency Theory. The research employs a qualitative approach using the library research method through the review of scientific journals, academic books, international reports, and policy documents related to the digital economy. The results of the study indicate that Indonesia's digital economy remains within a structure of global technological dependency, characterized by the dominance of foreign digital corporations in controlling platforms, algorithms, cloud computing, and user data management. This condition places Indonesia more as a consumer market and provider of digital data rather than a producer of digital technology. In this context, digital neocolonialism emerges through the control of data, technology, and digital infrastructure by global corporations originating from developed countries. In addition, domestic digital companies still face dependency on foreign capital, technology, and digital services. Therefore, strengthening data protection regulations, developing national digital infrastructure, and enhancing domestic technological innovation capacity are necessary to reinforce Indonesia's digital sovereignty.

Keywords: Digital Economy, Neocolonialism, Dependency Theory, Digital Sovereignty.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan platform digital, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan berupa dominasi platform digital transnasional dalam penguasaan teknologi, data, dan infrastruktur digital strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dominasi platform digital transnasional di Indonesia melalui perspektif Teori Ketergantungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) melalui telaah jurnal ilmiah, buku akademik, laporan internasional, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia masih berada dalam struktur ketergantungan teknologi global yang ditandai oleh dominasi perusahaan digital asing dalam penguasaan platform, algoritma, komputasi awan, dan

pengelolaan data pengguna. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia lebih dominan sebagai pasar pengguna dan penyedia data digital dibanding sebagai produsen teknologi digital. Dalam konteks ini, neokolonialisme digital muncul melalui penguasaan data, teknologi, dan infrastruktur digital oleh perusahaan global yang berasal dari negara maju. Selain itu, perusahaan digital domestik juga masih menghadapi ketergantungan terhadap modal, teknologi, dan layanan digital asing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi perlindungan data, pembangunan infrastruktur digital nasional, dan peningkatan kapasitas inovasi teknologi domestik guna memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Digital, Neokolonialisme, Teori Ketergantungan, Kedaulatan Digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi global pada abad ke-21. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, seperti perdagangan, pendidikan, transportasi, komunikasi, dan layanan keuangan. Digitalisasi tidak hanya mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga membentuk sistem ekonomi baru yang berbasis platform digital dan data.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024), nilai ekonomi digital Indonesia mencapai lebih dari USD 80 miliar dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan tersebut didukung oleh survey APJII (2026) adanya meningkatnya penetrasi internet pada tahun 2026 mencapai 81,72% meningkat sebanyak 1,06% dibandingkan tahun lalu yang berarti 235 juta jiwa penduduk Indonesia telah menggunakan dan memiliki akses internet. Peningkatan ini terus terjadi dari tahun ke tahun pada 2024 yaitu 79,50% meningkat 80,66% ditahun 2025, kemudian Berdasarkan survei APJII, smartphone menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat Indonesia untuk mengakses internet, serta perkembangan internet di Indonesia turut mendorong meningkatnya penggunaan layanan digital seperti e-commerce, financial technology (fintech), media sosial, dan layanan transportasi berbasis aplikasi.

Di balik pertumbuhan tersebut, perkembangan ekonomi digital Indonesia juga memperlihatkan dominasi perusahaan teknologi transnasional dalam berbagai sektor strategis digital. Platform seperti Google, Meta, TikTok, Amazon, dan Microsoft memiliki pengaruh besar dalam aktivitas digital masyarakat Indonesia, mulai dari penggunaan media sosial, mesin pencari, komputasi awan (*cloud computing*), hingga sistem periklanan digital (Siregar, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar infrastruktur dan teknologi digital strategis masih berada di bawah penguasaan perusahaan global. Widodo dkk. (2026) menjelaskan bahwa transformasi digital di Indonesia tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga memperlihatkan adanya dominasi platform global dalam pengendalian infrastruktur digital dan distribusi nilai ekonomi digital.

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah perusahaan digital domestik seperti GoTo, Bukalapak, dan Traveloka, sebagian besar perusahaan tersebut masih menghadapi ketergantungan terhadap modal asing, layanan komputasi awan

global, serta teknologi digital yang dikembangkan perusahaan luar negeri (Adiningsih, 2019). Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital nasional belum sepenuhnya menciptakan kemandirian teknologi domestik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang dominasi perusahaan teknologi global (Sudiby, 2019).

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Teori Ketergantungan (*Dependency Theory*). Teori ketergantungan berkembang sebagai kritik terhadap teori modernisasi yang menganggap keterbelakangan negara berkembang disebabkan oleh faktor internal semata. Teori ketergantungan atau Dependensi menjelaskan bagaimana ekonomi negara-negara terpinggirkan atau negara-negara Dunia Ketiga sangat bergantung pada negara Dunia Pertama atau inti. Ketika negara-negara perifer menajalin hubungan dengan negara inti, hubungan tersebut menciptakan ketergantungan, teori Dependensi memberikan gambaran tentang analisis dialektis bahwa ketergantungan yang terjadi antara suatu subsistem dengan subsistem lain yang dominan menjadi salahsatu faktor penentu dalam perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat (Arianto, 2021) dalam (Mahfuzah & Lubis, 2024).

Andre Gunder Frank (1967) menjelaskan bahwa keterbelakangan merupakan bagian dari hubungan struktural yang timpang antara negara pusat (*core*) dan negara pinggir (*periphery*) dalam sistem kapitalisme global (Fauzi, 2026). Sementara itu, Teori ketergantungan atau dependensi merupakan pengembangan dari teori Marxisme yang menjelaskan adanya ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, di mana perekonomian negara berkembang cenderung dipengaruhi dan dikendalikan oleh negara maju. Teori ini memandang bahwa pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari pengaruh eksternal, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya, yang memengaruhi kebijakan pembangunan nasional.

Theotonio Dos Santos menjelaskan bahwa ketergantungan merupakan kondisi historis yang membentuk struktur ekonomi dunia secara tidak seimbang, sehingga menguntungkan negara-negara maju dan merugikan negara berkembang. Dalam hubungan tersebut, perkembangan ekonomi negara berkembang terjadi sebagai akibat dari ekspansi ekonomi negara maju melalui sistem kapitalisme. Dengan demikian, teori ketergantungan menekankan bahwa kemajuan yang dicapai negara berkembang pada dasarnya masih berada di bawah pengaruh dan dominasi negara maju (Haq, 2024).

Dalam perkembangan kontemporer, bentuk ketergantungan tidak lagi hanya terjadi dalam bidang ekonomi dan politik konvensional, tetapi juga mengalami transformasi menuju ketergantungan digital. Perkembangan teknologi informasi, internet, dan ekonomi berbasis data melahirkan bentuk baru relasi kekuasaan global yang dikenal sebagai ketergantungan digital. Couldry dan Mejias (2019) memperkenalkan konsep *data colonialism*, yaitu praktik pengumpulan dan penguasaan data masyarakat secara masif oleh perusahaan digital global sebagai sumber keuntungan ekonomi baru (Yokotani et al, 2025). Dalam konsep ini, data dipandang sebagai sumber daya strategis layaknya sumber daya alam pada era

kolonialisme klasik, sehingga masyarakat digital secara tidak langsung menjadi objek eksploitasi ekonomi berbasis data.

Selain itu, Srnicek (2017) menjelaskan bahwa kapitalisme digital modern ditandai oleh dominasi perusahaan berbasis platform (*platform capitalism*) yang mengendalikan arus informasi, aktivitas ekonomi, komunikasi, serta data pengguna dalam skala global (Permatasari & Septiani, 2025). Perusahaan-perusahaan teknologi transnasional seperti Google, Meta, Amazon, dan TikTok tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan digital, tetapi juga sebagai aktor dominan yang memiliki kontrol terhadap infrastruktur digital, algoritma, distribusi informasi, hingga perilaku konsumsi masyarakat global (Ambardi et al, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi digital saat ini semakin terpusat pada perusahaan platform global yang memiliki kapasitas teknologi, modal, dan penguasaan data yang sangat besar.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital memang memberikan berbagai peluang, seperti meningkatnya transaksi digital, perluasan akses informasi, serta tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan UMKM berbasis digital. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memperlihatkan adanya ketergantungan terhadap perusahaan platform global, terutama dalam penggunaan layanan komputasi awan, media sosial, sistem pembayaran digital, mesin pencari, dan infrastruktur data. Ketergantungan ini berpotensi melemahkan kedaulatan digital nasional karena sebagian besar data pengguna, sistem teknologi, dan arus ekonomi digital masih berada di bawah kendali perusahaan asing (Rosidi & Laritmas 2026).

Beberapa penelitian sebelumnya cenderung membahas ekonomi digital dari perspektif pertumbuhan ekonomi, transformasi teknologi, dan inovasi digital. Sementara itu, kajian yang menyoroti dominasi platform digital transnasional melalui perspektif Teori Ketergantungan, khususnya terkait neokolonialisme digital dan kedaulatan digital Indonesia, masih relatif terbatas. Padahal, fenomena dominasi platform global menunjukkan adanya bentuk baru hubungan ketergantungan antara negara berkembang dan negara maju dalam era ekonomi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dominasi platform digital transnasional di Indonesia serta implikasinya terhadap kedaulatan digital nasional dalam perspektif Teori Ketergantungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena dominasi platform digital transnasional dan implikasinya terhadap kedaulatan digital Indonesia melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber literatur berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi digital dan teknologi informasi. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan

ekonomi digital, kapitalisme platform, teknologi informasi, dan teori ketergantungan.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Bank, serta *Google e-Conomy SEA Report*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai artikel ilmiah yang membahas kapitalisme digital, kolonialisme data (*data colonialism*), platform capitalism, dan ketergantungan digital di negara berkembang, khususnya Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tema dominasi platform digital dan ketergantungan teknologi. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif dan sistematis agar mempermudah proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan data yang ditemukan. Analisis data dilakukan secara kritis menggunakan perspektif Teori Ketergantungan untuk memahami posisi Indonesia dalam struktur ekonomi digital global serta melihat bagaimana dominasi perusahaan platform transnasional memengaruhi kemandirian teknologi dan kedaulatan digital nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dominasi Platform Digital Transnasional di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia didorong oleh meningkatnya penetrasi internet, penggunaan perangkat smartphone, serta berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis platform digital seperti e-commerce, transportasi daring, dan layanan keuangan digital. Survei APJII menunjukkan bahwa penetrasi internet Indonesia terus meningkat dan mencapai 81,7% pada tahun 2026. Selain itu, laporan *Google e-Conomy SEA Report* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia didorong oleh peningkatan aktivitas e-commerce, pembayaran digital, media online, dan layanan transportasi berbasis aplikasi.

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024), Indonesia menjadi negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial dalam perkembangan ekonomi digital global.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi digital Indonesia masih didominasi oleh perusahaan teknologi transnasional. Berbagai aktivitas digital masyarakat seperti penggunaan mesin pencari, media sosial, layanan video, komputasi awan, hingga sistem periklanan digital sebagian besar dikendalikan oleh platform global seperti Google, Meta, TikTok, Amazon, dan Microsoft. Dominasi tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan teknologi inti dalam ekonomi digital masih berada di tangan perusahaan asing.

Google misalnya, tidak hanya menguasai layanan mesin pencari, tetapi juga sistem operasi Android, platform video YouTube, layanan email Gmail, serta layanan komputasi awan Google Cloud. Demikian pula Meta menguasai media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang memiliki jutaan pengguna aktif di Indonesia. Dalam konteks ekonomi digital, dominasi platform tersebut memungkinkan perusahaan global mengendalikan arus informasi, perilaku pengguna, serta distribusi keuntungan ekonomi digital.

Dalam perspektif Teori Ketergantungan, kondisi tersebut menunjukkan hubungan struktural yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Sukmana et al. 2025 menjelaskan bahwa negara berkembang cenderung berada dalam posisi subordinat sebagai penyedia pasar dan sumber daya bagi negara pusat. Pada era digital, bentuk subordinasi tersebut mengalami transformasi melalui penguasaan teknologi, data, dan platform digital global.

Selain itu, perusahaan digital domestik di Indonesia juga masih menghadapi ketergantungan terhadap modal dan teknologi asing. Perusahaan seperti GoTo, Bukalapak, dan Traveloka memang menunjukkan perkembangan signifikan dalam ekonomi digital nasional, tetapi sebagian besar masih menggunakan layanan komputasi awan global serta memperoleh pendanaan dari investor internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan digital domestik belum sepenuhnya menciptakan kemandirian teknologi nasional.

Dalam konteks kapitalisme digital, Ario (2025) menjelaskan bahwa platform digital modern berkembang melalui pengumpulan data pengguna secara besar-besaran untuk memperkuat dominasi pasar. Semakin besar jumlah pengguna suatu platform, semakin besar pula kekuatan ekonomi dan pengaruh global perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dominasi platform digital transnasional tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan data dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi digital masyarakat.

Neokolonialisme Digital dan Ketergantungan Data

Ketergantungan Indonesia terhadap platform digital global tidak hanya terlihat dari penggunaan aplikasi digital masyarakat, tetapi juga pada penguasaan infrastruktur teknologi dan data digital. Dalam ekonomi digital modern, data menjadi sumber daya ekonomi yang memiliki nilai strategis tinggi. Aktivitas masyarakat di media sosial, *e-commerce*, layanan transportasi online, hingga layanan keuangan digital menghasilkan data dalam jumlah besar yang kemudian diolah oleh perusahaan teknologi global.

Couldry dan Mejias (2019) menyebut fenomena tersebut sebagai *data colonialism*, yaitu praktik pengumpulan dan penguasaan data masyarakat secara masif oleh perusahaan digital global sebagai bentuk baru dominasi ekonomi (Pahlewi et al 2019). Teori Kapitalisme Pengawasan yang diperkenalkan oleh Shoshana Zuboff (2019) menjelaskan bagaimana perusahaan teknologi menggunakan data yang dikumpulkan dari pengguna untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku mereka demi keuntungan ekonomi (Zuboff, 2019). Teori ini sangat relevan dalam menganalisis film "The Great Hack," yang menunjukkan bagaimana data pengguna digunakan untuk tujuan politik dan

komersial. Dalam konteks ini, data pengguna tidak lagi sekadar informasi pribadi, tetapi telah menjadi komoditas ekonomi yang digunakan untuk pengembangan algoritma, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan strategi bisnis digital.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang besar menjadi salah satu sumber data digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, sebagian besar pengolahan data tersebut dilakukan oleh perusahaan global yang memiliki kapasitas teknologi dan infrastruktur digital lebih maju. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih dominan berada pada posisi sebagai penyedia data pengguna dibanding sebagai pengembang teknologi digital.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya bentuk baru neokolonialisme digital. Jika kolonialisme klasik dilakukan melalui penguasaan wilayah dan sumber daya alam, maka neokolonialisme digital berlangsung melalui penguasaan data, teknologi, algoritma, dan infrastruktur digital global. Dalam kondisi ini, negara berkembang tidak lagi dieksploitasi melalui penjajahan fisik, tetapi melalui ketergantungan teknologi dan penguasaan data digital oleh perusahaan transnasional.

Ketergantungan tersebut juga terlihat dalam penggunaan layanan komputasi awan (*cloud computing*). Banyak perusahaan, institusi, dan platform digital di Indonesia masih menggunakan layanan cloud asing seperti Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, dan Microsoft Azure. Ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing menunjukkan bahwa kapasitas teknologi nasional masih belum sepenuhnya mandiri.

Dalam perspektif Theotonio Dos Santos (1970), ketergantungan teknologi terjadi ketika negara berkembang tidak memiliki kemampuan memadai dalam menguasai teknologi strategis sehingga bergantung pada negara maju. Pada era digital, bentuk ketergantungan tersebut mengalami perluasan melalui penguasaan algoritma, kecerdasan buatan, pusat data, dan infrastruktur komputasi global.

Selain itu, dominasi platform digital global juga menyebabkan konsentrasi keuntungan ekonomi pada perusahaan transnasional. Pendapatan dari iklan digital, pengolahan data pengguna, serta layanan berbasis platform sebagian besar terkonsentrasi pada perusahaan teknologi global. Dengan demikian, aktivitas ekonomi digital di negara berkembang tidak sepenuhnya menghasilkan distribusi keuntungan yang seimbang bagi negara pengguna.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak selalu menghasilkan kemandirian ekonomi nasional. Sebaliknya, tanpa penguatan kapasitas teknologi domestik, digitalisasi justru berpotensi memperkuat ketergantungan negara berkembang terhadap perusahaan teknologi global.

Tantangan Kedaulatan Digital Nasional

Dominasi platform digital transnasional menimbulkan tantangan besar terhadap kedaulatan digital Indonesia. Kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dalam mengendalikan data, infrastruktur digital, dan kebijakan teknologi secara mandiri (Gani, 2023)

Dalam praktiknya, negara menghadapi keterbatasan dalam mengawasi arus data lintas batas (*cross-border data flow*) karena sebagian besar platform digital global beroperasi melalui sistem jaringan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan data pengguna Indonesia dapat diproses dan disimpan di luar wilayah yurisdiksi nasional. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan pengawasan aktivitas digital.

Selain itu, dominasi platform global juga berpotensi memengaruhi kebijakan ekonomi digital nasional. Perusahaan teknologi global memiliki kekuatan modal, jaringan pasar, dan teknologi yang jauh lebih besar dibanding perusahaan lokal. Akibatnya, perusahaan digital domestik menghadapi kesulitan dalam bersaing secara setara dalam pasar digital global (Wibowo, 2025).

Dalam perspektif teori sistem dunia Immanuel Wallerstein (2004), negara berkembang cenderung berada dalam posisi pinggiran (*periphery*) yang bergantung pada negara pusat (*core*) dalam penguasaan teknologi dan ekonomi global (Fauzi, 2025). Pada era digital, struktur tersebut terlihat melalui dominasi negara maju dalam penguasaan platform digital, kecerdasan buatan, pusat data, dan teknologi komputasi global.

Kondisi tersebut juga berdampak pada terbatasnya kapasitas inovasi teknologi nasional. Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai konsumen teknologi dibanding produsen teknologi digital. Ketergantungan terhadap teknologi asing menyebabkan pengembangan inovasi domestik berjalan lebih lambat karena keterbatasan infrastruktur, riset, dan investasi teknologi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kedaulatan digital menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional. Negara perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, membangun pusat data nasional, meningkatkan investasi riset teknologi, serta mendorong pengembangan perusahaan digital domestik yang lebih mandiri. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia digital juga menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas inovasi nasional di era ekonomi digital (Persahda, 2025).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi digital tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pasar digital semata, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan kemandirian teknologi dan kedaulatan digital nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi ketergantungan terhadap platform digital transnasional.

SIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap platform digital transnasional. Dominasi perusahaan teknologi global dalam penguasaan platform, data, algoritma, dan infrastruktur digital menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam struktur ketergantungan teknologi global. Dalam perspektif Teori Ketergantungan, kondisi tersebut mencerminkan relasi yang tidak seimbang antara negara maju sebagai pemilik teknologi dan negara berkembang sebagai pengguna teknologi serta penyedia data digital. Selain itu, perusahaan digital domestik juga masih menghadapi ketergantungan terhadap modal, infrastruktur, dan teknologi global.

Fenomena tersebut menunjukkan munculnya bentuk baru neokolonialisme digital melalui penguasaan data, teknologi, dan infrastruktur digital oleh perusahaan transnasional. Dalam kondisi ini, negara berkembang cenderung berada pada posisi subordinat dalam struktur ekonomi digital global. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan terhadap kedaulatan digital nasional, khususnya dalam pengelolaan data, pengembangan teknologi domestik, dan penguatan kapasitas inovasi digital. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi perlindungan data, pembangunan infrastruktur digital nasional, peningkatan riset dan inovasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia digital guna memperkuat kemandirian teknologi Indonesia dalam ekonomi digital global.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambardi, K., Widhyharto, D. S., Madya, S. H., & Wibawanto, G. R. (2025). *Masyarakat digital: Teknologi kekuasaan dan kekuasaan teknologi*. Ugm Press.
- Ario, F. (2025). *Perilaku Konsumen dalam Gig Economy dan Platform Digital*. Serasi Media Teknologi.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia*. APJII. <https://survei.apjii.or.id/>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press.
- Dahrul Siregar, S. E. (2025). *Media Digital Baru: Ekonomi dan Bisnis Teknologi*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Dos Santos, T. (1970). The structure of dependence. *The American Economic Review*, 60(2), 231–236.
- Fauzi, S. (2026). *Sosiologi Pembangunan: Teori dan Konsep*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Fauzi, S. (2026). *Sosiologi Pembangunan: Teori dan Konsep*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Google, Temasek, & Bain Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024 Report*.
- Haq, M. A. I. (2024). Kerja Sama Energi Antara Nigeria Dan China Dalam Bidang Industri Minyak Tahun 2019-2021. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2463>
- Mahfuzah, N. Z., Nasution, Z., & Lubis, F. (2024). Implikasi globalisasi dan kapitalisme perspektif teori dependensi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Pahlewi, M. R., Pawito, P., & Hastjarjo, S. (2025). Komodifikasi Budaya Digital: Analisis Wacana Kritis Film *The Great Hack* (2019): The Commodification of Digital Culture: A Critical Discourse Analysis of the Film *The Great Hack*

- (2019). *Jurnal Audiens*, 6(4), Press-Press.
<https://doi.org/10.18196/jas.v6i4.717>
- Permatasari, D. B. A., & Septiani, D. (2025). Pemetaan Teori Teknokapitalisme: Systematic Literature Review. *Communicator Sphere*, 5(1), 43-58.
<https://doi.org/10.55397/cps.v5i1.131>
- Persadha, P. (2026). *Badan Pdp Dan Masa Depan Kedaulatan Digital Indonesia*. CISSREC.
- Rosidi, A., & Laritmas, S. (2026). *Ilmu Negara di Era Digital*. CV. Edu Akademi.
- Sri Adiningsih, S. E. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi, dan kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Srnicek, N. (2017). *Platform Capitalism*. Polity Press.
- Sudiby, A. (2019). *Jagat digital: pembebasan dan penguasaan*. Kepustakaan populer gramedia.
- Sukmana, O., Sulistyanyingsih, T., Damanik, F. H. S., Wahyudi, F. D., Ras, A., Astari, F., ... & Fauziyah, N. K. (2025). *Sosiologi Digital: Transformasi Sosial di Era Teknologi*. Star Digital Publishing,
- UNCTAD. (2021). *Digital Economy Report 2021*. United Nations.
- Wallerstein, I. (2004). *World-Systems Analysis: An Introduction*. Duke University Press.
- Wibowo, A. (2025). Disrupsi tata kelola global ekonomi digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widodo, S., Kristiyono, J., Aji, G. G., & Zulaikha, Z. (2026). Digital Capitalism and Platform Dependency in Indonesia: Media, Power, and Political Economy. *The Journal of Society and Media*, 10(1), 36-57.
<https://doi.org/10.26740/jsm.v10n1.p36-57>
- World Bank. (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank Publications.
- Yokotani, Y., Kurnia, A. C., Wirazilmustaan, W., & Salfutra, R. D. (2025). Pengendalian Data Pribadi Dan Ruang Siber Oleh Platform Digital Big Data Global Terkait Kedaulatan Digital Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 70-80.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: Routledge.
Retrieved from <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003320609-27/age-surveillance-capitalism-shoshana-zuboff>